

► PROYEK TOL

Serapan Land Capping Rp443,4 Miliar

JAKARTA—Penyerapan dana dukungan pemerintah untuk penyesuaian kenaikan harga lahan atau *land capping* telah mencapai Rp443,4 miliar untuk delapan ruas jalan tol, menyusul kontrak dengan badan usaha jalan tol terkait.

Dimas Novita Sari
redaksi@bisnisid.co.id

Kepala Satuan Kerja (Satker) Land Capping Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Nurdin Abdul Fatah mengatakan pada tahun ini Kementerian PU mendapatkan anggaran *land capping* sebesar Rp500 miliar.

Menurutnya, hingga saat ini, pihaknya baru mengalokasikan Rp443,4 miliar untuk delapan ruas jalan tol yang mencatat progres pembebasan lahan yang cukup pesat. Penyaluran dana dukungan pemerintah tersebut akan dilakukan secara selektif mengingat lambannya proses pembebasan lahan. "Kami telah melakukan kontrak dengan ruas jalan tol yang memiliki progres pembebasan tanah yang terlihat komitmen karena dana tersebut harus terserap dengan baik," ujarnya kepada

Bisnis, Rabu (19/6).

Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dapat terserap. Penyerapan dana *land capping* yang dialokasikan pada 2008, ujar Nurdin, penyerapannya tidak stabil bahkan cenderung rendah dalam kisaran 12%-62%.

Pemerintah berkomitmen memberikan dukungannya melalui *land capping* sebesar Rp4,89 triliun untuk tahun anggaran 2008, 2009, 2010, dan 2011 bagi 28 ruas tol. Adapun, kontrak penyaluran dana *land capping* dengan delapan badan usaha jalan tol (BUJT) yang sudah direalisasikan pada 2013 senilai Rp443,4 miliar. Sisanya masih belum dapat ditentukan karena pihaknya masih mengevaluasi perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) lainnya yang juga membutuhkan dana *land capping*.

Kendati demikian, menurutnya ruas jalan tol Solo-Kertosono diperkirakan juga akan mendapatkan dana *land capping* sebesar Rp39 miliar.

OPTIMALISASI

Ditjen Bina Marga optimis penyerapan dana *land capping* pada tahun ini dapat optimal dan menyusul beberapa proyek jalan tol yang sedang berjalan saat ini yang ditargetkan dapat selesai pada 2014.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah ruas jalan tol lainnya, Kementerian PU sudah mengajukan dana tambahan senilai Rp450 miliar. "Menteri PU sudah mengusulkan untuk penambahan dana *land capping* dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P), sejalan dengan banyaknya proses percepatan sejumlah pembangunan tol," tuturnya.

Dana *land capping* merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah karena perubahan harga tanah. Pemerintah menanggung beban pembiayaan lahan jika harga tanah mening-

kat lebih dari 110% dari harga awal. Dengan skema ini maka kenaikan harga tanah sebesar 10% akan ditanggung oleh pemerintah.

Dalam perkembangan lainnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merevisi target operasi sejumlah tol hingga 2015.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengatakan beberapa proyek jalan tol yang sedang berjalan berpotensi mundur operasi dari sebelumnya akhir 2014 menjadi 2015. Dia menyebutkan dua proyek jalan tol yang diprediksi tidak dapat meraih target operasi pada 2014 seperti Depok-Antasari dan JORR 2. "Sebenarnya semua tol kalau selesai lebih cepat akan lebih baik. Ini hanya masalah prioritas saja," katanya. ■

► Delapan ruas jalan tol dinilai mencatat progres pembebasan lahan yang cukup pesat.

► Penyerapan dana *land capping* pada tahun ini diyakini optimal.

► Badan Pengatur Jalan Tol merevisi target operasi sejumlah jalan tol hingga 2015.



Penyaluran Dana Dukungan Pemerintah untuk Kenaikan Harga Lahan (Land Capping)

Ruas	Dana Land Capping	BUJT
Surabaya-Mojokerto	Rp125 miliar	PT Marga Nujusuma Agung
Bojor Ring Road (BORR) II A	Rp30 miliar	PT Marga Sarona Jabar
Pejagan-Pemalang	Rp35 miliar	PT Pejagan Pemalang Toll Road
Gempol-Pasuruan	Rp25 miliar	PT Transmarga Jatim Pasuruan
Semarang-Solo	Rp23,4 miliar	PT Trans Marga Jateng
Cinere-Jaqorawi	Rp75 miliar	PT Translingkar Kita Jaya
JORR W2	Rp30 miliar	PT Marga Lingkar Jakarta
Depok-Antasari	Rp100 miliar	PT Citra Wasspphitowa

Sumber: Ditjen Bina Marga, BPJT, 19/6/13

...SINERJITICO.ORG